

UNTUK ALOR YANG BERKELANJUTAN, ADIL DAN SEJAHTERA
Tinjauan Pemikiran Singgih-Evanoff Terhadap Kemungkinan Dampak Kebijakan
Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur



OLEH:

TEGUH LAMENTUR TAKALAPETA

50220139

TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
DALAM MENCAPAI GELAR MAGISTER
PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

MEI 2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Lamentur Takalapeta
NIM/NIP/NIDN : 50220139
Program Studi : Magister Filsafat Keilahian
Judul Karya Ilmiah : UNTUK ALOR YANG BERKELANJUTAN, ADIL DAN SEJAHTERA: Tinjauan Pemikiran Singgih-Evanoff Terhadap Kemungkinan Dampak Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

dengan ini menyatakan:

- a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer*.
- b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

- Dapat diakses tanpa embargo.
- Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

- dalam proses pengajuan paten.
- akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- Lainnya (mohon dijelaskan)

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Mengetahui,

Pdt. Prof. Dr (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D
NIDN: 8897033420

Yang menyatakan,

Teguh Lamentur Takalapeta
NIM: 50220139

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul:

UNTUK ALOR YANG BERKELANJUTAN, ADIL DAN SEJAHTERA
Sebuah Tinjauan Pemikiran Singgih-Evanoff Terhadap Kemungkinan Dampak Kebijakan
Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Teguh Lamentur Takalapeta

(NIM: 50220139)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Filsafat Keilahian Program Magister

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Pada tanggal 27 Mei 2025 dan Dinyatakan LULUS

Dosen Pembimbing 1

Pdt. Prof. Dr (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D

Dosen Pembimbing 2

Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D

Dosen Penguji:

1. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D

2. Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D

3. Pdt. Prof. Dr (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D

Disahkan oleh:

Kepala Program Studi Filsafat Keilahian

Program Magister



Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam tesis ini dan disebutkan di dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya bersedia melepaskan gelar magister saya.

Yogyakarta, 13 Juni 2025



Handwritten signature of Teguh Lamentur Takalapeta.

Teguh Lamentur Takalapeta



KATA PENGANTAR

Tesis ini adalah cerminan peziarahan akademik, spiritual dan ministerial penulis yang bergulat dengan panggilannya untuk terlibat dalam dunia secara utuh. Dalam formasi akademik, peziarahan penulis bergerak dari semula berfokus dalam spiritualitas dan filsafat ketuhanan menjadi berfokus pada teologi publik terutama berbagai isu politik dan kebijakan publik. Dalam formasi spiritualitas, nilai-nilai kehidupan yang dijaga melalui nyanyian meditatif dari Komunitas Taize senantiasa mengiringi peziarahan dengan semangat *lutte et contemplation*, berjuang-berkontemplasi, berdoa-bekerja, sorga-bumi. Dalam formasi ministerial, pergulatan antara pelayanan di gereja atau masyarakat akhirnya dapat diselesaikan dengan bukan terjebak pada salah satunya, tetapi melampaui keduanya. Sebab selain dibesarkan dalam lingkungan pelayanan gerejawi yang dilayani oleh ibu, penulis juga “dikaderkan” dalam lingkungan karir kepemimpinan politik ayah. Dua gen pelayanan gerejawi dan pengabdian politik ini kemudian membentuk penulis sebagai pemimpin yang mengabdikan bukan hanya kepada gereja, tetapi juga masyarakat secara lebih luas. Ketiga peziarahan itu ditempuh secara berkait-kelindan dengan prinsip percaya kepada masa kini dan masa depan sebagai penyelenggaraan ilahi (*providentia Dei*) dengan terus mengasah keprihatinan terhadap isu-isu etis-teologis dalam masyarakat, dan mencoba menyelesaikannya untuk membawa kebaikan bagi banyak orang.

Tesis ini berangkat dari dua keprihatinan awal penulis. Di satu sisi, penulis prihatin bagaimana teologi dapat berdialog dengan sumber yang relevan untuk menghadapi isu hilirisasi yang dipandang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, namun realisasinya malah menyulitkan masyarakat, merugikan alam dan menunjukkan tingginya jurang ketimpangan. Di sisi lain, keprihatinan tersebut juga berangkat dari mimpi untuk melihat kampung halaman, daerah Kabupaten Alor, menjadi daerah yang lebih berkelanjutan ekologisnya, lebih adil masyarakatnya, dan lebih sejahtera manusia di dalamnya. Namun peran teologi selama ini lebih besar di gereja ketimbang masyarakat. Walaupun masyarakat dibicarakan, sifatnya hanya sebagai sasaran teologi, bukan sebagai subjek yang diberi kesempatan untuk ikut mengolah teologi. Karena itu, dengan pendekatan teologi publik, agen pemikir ilmu sosial, lingkungan dan politik yang bukan teolog dilibatkan dan isu yang biasanya dianggap bukan isu teologi juga dibicarakan, yakni isu-isu seputar hilirisasi industri rumput laut di Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Penulis membayangkan *end game* setelah mengarungi studi magister filsafat keilahian kajian teologi publik ini adalah keterlibatan aktif dalam pelayanan kelembagaan sosial di NTT dalam menggumuli partisipasi politik kristiani sambil terlibat langsung dalam politik praktis sebagai jalan pelayanan pemimpin yang mengabdikan.

Untuk sampai mendalami sum-sum peziarahan kehidupan akademik, spiritualitas dan ministerial semacam itu, penulis menyadari ada topangan doa, dukungan, dan bantuan dari keluarga, kampus, fakultas, sahabat, kekasih, organisasi dan gereja. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang belum sempat dituliskan namanya, penulis harus secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga yaitu Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ir. Ansgerius Takalapeta dan Ibu Em. Dina M. Takalapeta-Meler, S.Th., M.Pd, Kaka Psikolog Theodora Takalapeta, S.Psi., M.Psi bersama ipar dosen-aktivis Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP., M.IP dan kedua keponakan terkasih, Eirene Briella Sabaat dan Ernesto Gieans Sabaat, Kaka dr. Anita Takalapeta, S.Ked bersama ipar dosen-entrepreneur Imanuel Yosafat Hadi Manapa, S.Pd., M.Pd, dan adik terkasih, Andayani Takalapeta, yang kelak menjadi pakar bisnis digital; kepada kekasih hati Srimayu Fara, S.Kom yang senantiasa kudoakan menjadi sahabat kehidupanku di sorga-bumi; kepada Dosen Pembimbing, Pdt. Prof. Dr. (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D dan Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D, serta Dosen Penguji, Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D; kepada Kaprodi Filsafat Keilahian Program Magister, Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D; kepada Staff Fakultas Teologi UKDW, Ibu Martha Pritzanda Pudhika, S.Pd (Admin Prodi Filsafat Keilahian Program Magister) dan Ibu Niken Juhari, A.Md; kepada Senior dan Mentor perkuliahan dan organisasi GMKI, Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th; kepada Senior GMKI dan GAMKI yang secara dekat mengajarkan bagaimana menata kehidupan politik dan bisnis yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, dr. Edy Wibowo, Sp.M(K), MPH, dan Mahendra Setyahadi Nugraha S.E; kepada sahabat seperjuangan dan sepergerakan yang berjuang dengan mimpi masa depan secara bersama-sama, yaitu Ketua Umum GMKI 2022-2024 Jefri Edi Irawan Gultom, Tomi Brajan, S.M, M.B.A, Rizath Widodo Selan, S.M, Yosua Agung Wicaksono Yunanto, S.Fil, Jhonboltus Fara, S.H, Advokat Charmandani Umbu Hina. S.H, M.H, dan Irenius Umbu Gauka Rajang, S.T, M.T, dan adinda Ketua Cabang GMKI Yogyakarta 2024-2026 Umbu Valentino Kanna Ngundju Mbani, S.T; kepada organisasi, BPC GMKI Yogyakarta, Badan Pengurus Komisariat Daud, YMCA Yogyakarta, GAMKI Yogyakarta, dan YAKOMA PGI Yogyakarta; kepada mentor selama berpelayanan dan menjadi warga jemaat titipan di GKJ Gondokusuman, yaitu Pdt. Dorkas Natalina S.E., M.Si.Teol; serta semua senior, sahabat dan kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan namanya.

Yogyakarta, Senin, 16 Juni 2025

Teguh Lamentur Takalapeta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Kerangka Teori	4
1.2.1.Tentang Teologi Publik.....	4
1.2.2.Bioregionalisme Richard Evanoff dalam Kacamata E.G. Singgih	8
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Pertanyaan Penelitian.....	14
1.5. Metodologi Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II MASALAH HILIRISASI RUMPUT LAUT ALOR, NTT DAN TEORI BIOREGIONALISME DAN TRANSAKSIONALISME SINGGIH-EVANOFF	17
2.1. Pengantar.....	17
2.2. Masalah Kebijakan Hilirisasi Industri Rumput Laut	17
2.2.1 Potensi Hilirisasi Rumput Laut Dunia	17
2.2.2 Wacana Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut di Indonesia.....	18
2.2.3 Masalah Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut di NTT	22
2.2.4 Dampak Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut di Alor, Provinsi NTT	24
2.4. Teori Bioregionalisme dan Transaksionalisme Richard Evanoff yang Direfleksikan oleh Emanuel Gerrit Singgih	28
2.4.1.Etika Bioregionalime: Beberapa Pertimbangan.....	28
2.4.2 Pendekatan Transaksionalisme	31
2.4.3 Tanggapan Singgih Terhadap Evanoff: Segitiga Steiner-Evanoff-UKDW.....	35
2.5. Penutup	39

BAB III ANALISIS MASALAH HILIRISASI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN ALOR, PROVINSI NTT MENGGUNAKAN PEMIKIRAN SINGGIH-EVANOFF41

3.1. Pengantar.....	41
3.2. Deskripsi Ketiga Lokasi Penelitian.....	41
3.2.1. Budidaya Rumput Laut di Desa Aimoli.....	41
3.2.2. Budidaya Rumput Laut di Desa Bana.....	45
3.2.3. Budidaya Rumput Laut di Desa Blangmerang, Pulau Lapang	48
3.3. Analisis Teori Bioregionalisme dan Transaksionalisme Singgih-Evanoff.....	51
3.3.1. Motivasi Para Petani Rumput Laut dan Sikap Terhadap Hilirisasi	51
3.3.2. Aspek Keberlanjutan Ekologis	52
3.3.3. Aspek Keadilan Sosial	54
3.3.4. Aspek Kesejahteraan Manusia.....	57
3.4. Menemukan Tuhan dalam Masalah Hilirisasi Rumput Laut: Sebuah Refleksi Tafsiran Sosio-Ekologis Terhadap Perikop Lukas 5:1-11	60
3.5. Penutup	70

BAB IV DARI ALAM LIAR, BUDIDAYA MENUJU HILIRISASI RUMPUT LAUT: BAGAIMANA SITUASI IDEALNYA?.....71

4.1. Pengantar.....	71
4.2. Memahami Rumput Laut: Dari Alam Liar, Budidaya Menuju Hilirisasi.....	71
4.2.1. Sejarah Rumput Laut: Dari Panen Alam Liar Menuju Budidaya	71
4.2.2. Agenda Berikutnya? Dari Budidaya Menuju Hilirisasi Rumput Laut.....	80
4.3. Hilirisasi Rumput Laut di Alor, Nusa Tenggara Timur	84
4.3.1. Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut di NTT	84
4.3.2. Kebijakan Hilirisasi Rumput Laut yang Gagal.....	87
4.4. Pembaruan Konsep Hilirisasi Rumput Laut: Bagaimana Situasi Idealnya?.....	89
4.5. Penutup	90

BAB V PENUTUP.....91

5.1. Kesimpulan	91
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....94

LAMPIRAN.....98

ABSTRAK

Tesis ini meneliti realisasi kebijakan hilirisasi industri rumput laut sebagai agenda nasional yang secara regional juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan. Masalah etis-teologis utama yang disoroti dalam realisasinya adalah kurangnya keseimbangan relasi antara aspek keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Dengan memakai penelitian kualitatif, metodologi teologi publik Darragh dan pendekatan teologi publik Singgih, tesis ini berupaya menjawab pertanyaan utama yaitu sejauh mana teori bioregionalisme dan transaksionalisme Evanoff yang direfleksikan Singgih cocok dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi industri rumput laut bagi para petani di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur? Temuan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa teori bioregionalisme Evanoff yang direfleksikan Singgih tidak cocok sama sekali dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi rumput laut di Alor, NTT. Oleh karena itu, untuk mencapai Alor yang berkelanjutan, adil dan sejahtera, tesis ini menyarankan tiga hal. Pertama, perlunya mendorong penghapusan kebijakan semacam itu dan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di masa depan, sehingga kewenangan kebijakan hilirisasi dikembalikan kepada pemerintah pusat. Kedua, mendorong model budidaya rumput laut yang benar-benar efektif bagi Kabupaten Alor sehingga para petani dapat menghasilkan produk rumput laut yang berkualitas. Ketiga, mendorong kolaborasi bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Alor, pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Pusat, serta berbagai stakeholder untuk mewujudkan hilirisasi industri rumput laut di Kabupaten Alor, sejauh tetap mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut yang menjaga keseimbangan aspek keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.

Kata Kunci: Bioregionalisme, Transaksionalisme, Singgih-Evanoff, Hilirisasi, Rumput Laut, Alor, Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

This thesis examines the realization of the seaweed industry downstreaming policy as a national agenda that is also regionally carried out by the East Nusa Tenggara provincial government through the East Nusa Tenggara (NTT) Governor Regulation (Pergub) No. 39 of 2022 concerning Fishery Commodity Trade. The main ethical-theological problem highlighted in its realization is the lack of balance in the relationship between aspects of ecological sustainability, social justice and human well-being. Using qualitative research, Darragh's public theology methodology and Singgih's public theology approach, this thesis attempts to answer the main question, namely to what extent do Evanoff's bioregionalism and transactionalism theories reflected by Singgih match the possible impacts of the seaweed industry downstreaming policy for farmers in Alor Regency, East Nusa Tenggara? The findings of this thesis research indicate that Evanoff's bioregionalism theory reflected by Singgih does not match at all with the possible impacts of the seaweed downstreaming policy in Alor, NTT. Therefore, to achieve a sustainable, just and prosperous Alor, this thesis suggests three things. First, the need to encourage the elimination of such policies and must not be allowed to happen again in the future, so that the authority for downstream policies is returned to the central government. Second, encourage a truly effective seaweed cultivation model for Alor Regency so that farmers can produce quality seaweed products. Third, encourage joint collaboration between the Alor Regency regional government, the NTT Provincial government and the Central government, as well as various stakeholders to realize the downstreaming of the seaweed industry in Alor Regency, as long as they continue to consider the impact of the policy that maintains the balance of aspects of ecological sustainability, social justice and human well-being.

Keywords: Bioregionalism, Transactionalism, Singgih-Evanoff, Downstream, Seaweed, Alor, East Nusa Tenggara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Rumput laut adalah kelompok alga yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, bahan baku industri, maupun pendukung ekosistem laut. Perkembangannya dimulai dari eksploitasi di alam liar hingga menjadi komoditas budidaya yang berpotensi besar dalam hilirisasi industri. Kebijakan hilirisasi rumput laut di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan industri rumput laut yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Hilirisasi, yaitu proses meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan lebih lanjut, menjadi fokus utama dalam memaksimalkan potensi ekonomi rumput laut. Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk-produk turunan yang bernilai tinggi. Namun, hingga saat ini, lebih dari 60% ekspor rumput laut masih dalam bentuk mentah atau kering, menunjukkan bahwa hilirisasi belum optimal.¹ Pemerintah telah menegaskan bahwa program hilirisasi sumber daya akan diperluas ke sektor perikanan, termasuk rumput laut, dengan tujuan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi masa depan Indonesia.²

Nilai ekonomi dari hilirisasi rumput laut di Indonesia diproyeksikan akan mencapai angka yang sangat signifikan. Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan hilirisasi rumput laut akan menghasilkan sekitar USD 19 miliar atau sekitar Rp 304 triliun. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1 juta orang dan memanfaatkan hingga 1,2 juta hektare lahan budidaya.³ Hilirisasi rumput laut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya tetapi juga mendorong inovasi di sektor bioplastik, biostimulan, dan produk-produk farmasi yang berasal dari komoditas ini. Dengan dukungan lintas sektor, potensi pasar global untuk produk olahan rumput laut diproyeksikan mencapai USD 11,8 miliar.⁴

¹ Administrator, "Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves: Potensi Hilirisasi Sangat Besar," *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi*, <https://maritim.go.id/detail/tingkatkan-produksi-rumput-laut-menko-marves-potensi-hilirisasi-sangat-besar>, 29 Februari 2024.

² Shifa Nur Fadila, "Jokowi Sebut Rumput Laut Berpotensi Jadi Kekuatan Ekonomi Indonesia," *Nasional Kontan*, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-sebut-rumput-laut-berpotensi-jadi-kekuatan-ekonomi-indonesia>, 9 Oktober 2024.

³ Astri Yuanasari, "Luhut Targetkan Hilirisasi Rumput Laut Capai Rp304 Triliun di 2030," *Kbr.id*, <https://kbr.id/berita/nasional/luhut-targetkan-hilirisasi-rumput-laut-capai-rp304-triliun-di-2030>, 22 Mei 2024.

⁴ Administrator, "Indonesia dan Hilirisasi Rumput Laut: Peluang Besar di Sektor Maritim," <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8395/indonesia-dan-hilirisasi-rumput-laut-peluang-besar-di-sektor-maritim>, 17 Juli 2024.

Kebijakan hilirisasi rumput laut secara nasional tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas rumput laut di sektor hulu, mengembangkan industri pengolahan rumput laut di sektor hilir untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan, dan memperkuat daya saing produk rumput laut di pasar global melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi produk olahan. Tujuan tersebut memiliki visi utama yaitu menjadikan Indonesia sebagai produsen utama dan pemasok produk rumput laut olahan yang berdaya saing tinggi di pasar internasional.⁵

Road Map Rumput Laut juga memuat strategi pengembangan pasar untuk meningkatkan akses produk olahan rumput laut Indonesia ke pasar global dan memungkinkan petani rumput laut mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk hasil panen mereka, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan antara petani di daerah pesisir dengan kelompok masyarakat yang bekerja di sektor lain yang lebih menguntungkan. Selain itu, dengan adanya hilirisasi, akan tercipta lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi produk rumput laut. Pembangunan pabrik pengolahan, akses jalan, dan fasilitas lainnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, sehingga meningkatkan keadilan sosial di wilayah yang sebelumnya tertinggal. Di samping aspek ekonomi dan sosial, *road map* ini juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam proses hilirisasi rumput laut. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses pengolahan dan produksi produk turunan rumput laut menjadi elemen penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Teknologi modern yang efisien dapat membantu mengurangi limbah, meminimalkan emisi karbon, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan penghasil rumput laut *kappaphycus alvarezii* kedua terbesar di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016). Karena itu, industri rumput laut menjadi salah satu sektor penting yang didorong oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemprov NTT pernah mengeluarkan kebijakan hilirisasi rumput laut yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan. Pergub tersebut bertujuan untuk mengatur tata niaga komoditas perikanan, termasuk rumput laut. Salah satu kebijakan utamanya adalah pelarangan pengiriman rumput laut mentah atau bahan baku keluar

⁵ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021.

dari Provinsi NTT. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, yaitu dengan memproses rumput laut di dalam provinsi sehingga produk yang dijual memiliki nilai lebih tinggi. Terdapat beberapa pabrik di NTT yang diwajibkan untuk menerima seluruh bahan baku rumput laut dari petani lokal, mengolahnya, dan memastikan pajak serta tenaga kerja lokal diberdayakan.

Pertama, PT. Algae Sumba Timur Lestari. Pabrik ini berada di Sumba Timur dan merupakan salah satu dari sedikit industri pengolahan rumput laut di provinsi ini. Pabrik ini mampu mengolah rumput laut kering dari petani lokal menjadi produk yang siap dijual di pasar.⁶ Kedua, PT. Rote Karaginan Nusantara. Pabrik ini terletak di Pulau Rote dan berfokus pada pengolahan rumput laut untuk menghasilkan karaginan, suatu bahan yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Karaginan diekstraksi dari rumput laut jenis tertentu, dan memiliki nilai jual yang tinggi.⁷ Ketiga, CV. Agar Kembang. Pabrik ini terletak di Pulau Semau (Kabupaten Kupang) dan menerima rumput laut basah, namun secara aktif berkolaborasi dengan pabrik-pabrik lain yang lebih fokus pada pengolahan rumput laut kering. CV Agar Kembang memiliki kapasitas pengolahan yang lebih fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah.⁸ Peran pabrik-pabrik ini sangat penting dalam menjalankan kebijakan hilirisasi yang diterapkan melalui Pergub NTT No. 39 Tahun 2022. Mereka diwajibkan untuk membeli seluruh bahan baku rumput laut dari petani lokal dengan harga yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pabrik-pabrik ini juga diharuskan mempekerjakan tenaga kerja lokal dan membayar pajak serta retribusi kepada pemerintah daerah.

Namun kebijakan tersebut diprotes para petani rumput laut. Mereka meminta pemerintah mencabut pergub tersebut karena dinilai berat sebelah dan tidak berpihak pada mereka.⁹ Pergub itu dinilai membuat harga rumput laut di tingkat petani menurun drastis. Menyoroti tiga perusahaan yang ditunjuk Gubernur untuk membeli semua rumput laut di NTT, mereka menilai bahwa harga satu kilo yang dibeli perusahaan itu terlalu murah ketimbang harga yang selama ini mereka jual ke pengusaha di Makassar. Karena itu, mereka ingin kembali

⁶ Admin, Resmi! Pemprov NTT Larang Perusahaan Swasta Kirim Rumput Laut Keluar Daerah," *Detik Data.com*, <https://detikdata.com/resmi-pemprov-ntt-larang-perusahaan-swasta-kirim-rumput-laut-keluar-daerah>, 25 Juli 2022.

⁷ Admin, "Resmi! Pemprov NTT Larang,"

⁸ Alberto, "Sosialisasi Pergub, Pemprov NTT Resmi Melarang Perusahaan Swasta Mengirim Rumput Laut Keluar Daerah," *Liputan7.id*, <https://liputan7.id/sosialisasi-pergub-pemprov-ntt-resmi-melarang-perusahaan-swasta-mengirim-rumput-laut-keluar-daerah>, 23 Juli 2022.

⁹ Mario Sina, "Petani dan Pengepul di Lembata Desak Gubernur NTT Cabut Pergub Rumput Laut," *Kumparan*, <https://kumparan.com/florespedia/petani-dan-pengepul-di-lembata-desak-gubernur-ntt-cabut-pergub-rumput-laut-1zHbMvtPhbw/full>, 20 November 2022.

seperti dulu, bebas menjual rumput laut tidak hanya kepada tiga pengusaha yang berkantor di NTT. Sebab harga yang ditawarkan pembeli dari luar provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan pengusaha yang berkantor di NTT.¹⁰ Berdasarkan data di atas, terlihat permasalahan awal pergub yang mengatur hilirisasi industri rumput laut di NTT. Kebijakan pemerintah daerah yang mengklaim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berakibat sebaliknya, yaitu memiskinkan masyarakat. Para pengusaha rumput laut yang berinvestasi di NTT malah mendapatkan keuntungan besar di tengah kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan para petani rumput laut. Karena itu, mereka mendesak pencabutan aturan tersebut agar para petani dapat melakukan transaksi dengan bebas.

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Tentang Teologi Publik

Sebelum kita melihat teori Richard Evanoff yang dipakai Emanuel Gerrit Singgih (selanjutnya Singgih), kita perlu memahami teologi publik terlebih dulu. Setidaknya, diskursus teologi publik memiliki tiga pendekatan yaitu konfrontatif yang dapat diwakili oleh pemikiran J.B. Banawiratma, negosiatif (rekonsiliatif) yang dapat dilihat dalam pemikiran Yahya Wijaya, dan melampaui keduanya, yang dapat diwakili oleh pemikiran Singgih. Pertama, pendekatan konfrontatif. Menurut Banawiratma, publik tidak bebas dari kepentingan dan konflik pilihan. Dalam konflik kepentingan itu teologi publik tidak netral, sebab posisi netral berarti membiarkan yang lemah kalah, dan yang dipinggir tersingkir. Bersikap netral berarti berada pada pihak kekuatan yang mengalahkan dan yang menyingkirkan. Karena itu, teologi publik perlu merumuskan dulu nilai apa yang mau dibela dan dikembangkan. Bagi Banawiratma, nilai tersebut adalah pembebasan korban ketidakadilan berdasarkan analisis sosial struktural yang berakar pada analisis Karl Marx. Dengan kata lain, pendekatan teologi publik Banawiratma nampaknya diinspirasi oleh filsafat Marx.¹¹ Tanpa nilai tersebut, teologi publik hanya mengamankan *status quo* yang tidak berdampak membawa perubahan. Teologi publik yang tidak berorientasi pada pembebasan bagi dan bersama korban ketidakadilan biasanya tidak menegaskan pemihakan pada korban ketidakadilan. Teologi semacam itu biasanya juga menghindari isu ketidakadilan, atau mungkin isu ketidakadilan disebut tetapi tidak didiskusikan melalui analisis sosial tertentu yang dipertanggungjawabkan. Dalam buku yang

¹⁰ Kornelis Kema Ama, "Petani Rumput Laut NTT Ingin Pergub Tata Niaga Komoditas Perikanan Dicabut," *Kompas.id*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/13/petani-rumput-laut-ntt-ingin-pergub-tata-niaga-komoditas-perikanan-dicabut?status=sukses_login, 13 Maret 2023.

¹¹ J.B. Banawiratma, "Pertimbangan Mengenai Teologi Publik Yang Berorientasi Pembebasan Holistik, makalah webinar EATWOT Indonesia, 18 Desember 2021, 3.

disuntingnya, Banawiratma mencontohkan lima wujud teologi publik yang berupaya berpihak pada korban ketidakadilan demi pembebasan dari ketidakadilan sosial maupun ketidakadilan ekologis.¹² Dengan demikian, teologi publik baginya harus berorientasi pada pembebasan holistik atau pada keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri pendekatan konfrontatif dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, teologi publik bersifat apriori dengan berangkat dari nilai pemihakan terhadap kelompok tertentu. Kedua, teologi publik bersifat Marxian yang berfokus pada analisis struktur. Ketiga, teologi publik bersifat merevolusi dengan jalan perjuangan atau protes. Keempat, teologi publik membayangkan kemenangan pribadi di atas “musuh”. Kelima, meskipun memperhatikan analisis ilmu sosial dalam memetakan situasi terkini sembari menyadari kompleksitas situasi, teologi publik bersifat penilaian hitam-putih. Keenam, teologi publik berfokus pada imajinasi abstrak sebuah subjek seperti rakyat, orang miskin, dan penguasa. Dengan demikian, teologi publik konfrontatif bersikap profetik dengan tujuan membawa kebenaran dan pertobatan tanpa mempertimbangkan pentingnya transformasi kedua belah pihak.

Kedua, pendekatan negosiatif atau rekonsiliatif. Bagi Wijaya, teologi publik senantiasa menjadikan isu-isu publik sebagai titik tolak bagi suatu konstruksi teologis yang relevan bagi pembentukan suatu kebijakan publik.¹³ Karena itu, teologi publik bersifat lintas disiplin ilmu dimana perwacanaan dalam suatu atau beberapa disiplin keilmuan dikaji dan ditanggapi dengan memanfaatkan sumber-sumber teologis yang relevan. Karena itu, Wijaya melihat bahwa teologi publik perlu mengambil sikap serealistis mungkin dan menghindari posisi yang terlalu utopian sehingga bersifat negosiatif ketimbang konfrontatif.¹⁴ Sifat teologi publik baginya bukanlah profetik yang membawa kebenaran sepihak dalam ruang publik dengan semangat penghakiman, melainkan responsif dan negosiatif yang menjadikan berbagai pihak dalam ruang publik sebagai mitra untuk berjalan bersama mencari kebenaran. Pandangan Wijaya itu berangkat dari asumsi bahwa *platform* teologi publik adalah masyarakat demokratis dimana terdapat jaminan atas komunikasi antar penghuni ruang publik dan kebebasan berbeda pendapat.¹⁵ Apakah berarti negosiasi tidak dapat berjalan tanpa jaminan masyarakat demokratis? Bagi Wijaya, memang betul bahwa tidak ada praktik demokrasi yang benar-benar

¹² J.B. Banawiratma, *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023).

¹³ Yahya Wijaya, *Profitability, Solidarity, Sustainability: Tinjauan Teologi Publik tentang Kewirausahaan Lestari* (Yogyakarta: TPK, 2021), 6.

¹⁴ Wijaya, “Profitability,” 6-7.

¹⁵ Wijaya, “Profitability,” 8-9.

sempurna. Namun justru ketidaksempurnaan demokrasi sendiri merupakan bagian dari isu publik yang layak dipergumulkan.¹⁶ Dengan demikian, teologi publik dengan pendekatan negosiatif juga tetap relevan dalam praktik demokrasi masyarakat yang tidak sempurna.

Salah satu contoh teologi publik dengan pendekatan negosiatif dapat dilihat dalam tulisan Wijaya berjudul *Profitability, Solidarity, Sustainability: Kajian Teologi Publik tentang Kewirausahaan Lestari* (2021). Dalam tulisan ini, Wijaya berupaya mencari titik-titik temu untuk mendamaikan kepedulian teologis, ekologis, dan kewirausahaan sebagai satu konsep integral demi kebaikan bersama. Wijaya menggunakan pendekatan kultural ketimbang struktural yang bertolak dari penelitian sosiologis Weberian.¹⁷ Dengan perkataan lain, Wijaya berupaya menegosiasikan kepentingan keuntungan ekonomi, keberpihakan atau solidaritas terhadap yang tertindas, dan keberlanjutan ekologis. Menurutnya, diskursus teologis tentang kewirausahaan masih sangat terbatas sehingga mengesankan bisnis dianggap lebih sebagai penyebab atau masalah ketimbang solusi, sedangkan diskursus teologis tentang ekologi cenderung terfokus pada aras filosofis. Karena itu, hasil temuannya memperlihatkan bahwa “sementara agama-agama mengandung sumber-sumber teologis yang dapat diolah menjadi solusi filosofis bagi krisis lingkungan, kewirausahaan lestari adalah bagian dari dunia bisnis yang selama ini mengupayakan solusi praktis.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, ciri-ciri teologi publik dengan pendekatan negosiatif dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, teologi publik cenderung mereformasi ketimbang merevolusi. Kedua, teologi publik mengambil sikap dialog, debat dan percakapan, ketimbang perjuangan atau protes. Ketiga, teologi publik membayangkan kebaikan bersama semua pihak dalam ruang publik. Keempat, teologi publik menghindari posisi apriori terhadap suatu kelompok tertentu, sehingga mencari negosiasi dan kemungkinan kompromi di antara posisi-posisi yang berkonflik. Kelima, teologi publik menghindari penilaian hitam-putih. Keenam, teologi publik menghindari imajinasi abstrak sebuah subjek, sehingga mencari bukti-bukti dan definisi yang terukur. Dengan demikian, teologi publik negosiatif bukanlah bersikap profetik melainkan responsif dan kontekstual, dimana menegosiasikan konteks yang berubah (situasi, teori, dan gagasan di ruang publik) dengan sumber daya teologis, sehingga berorientasi pada transformasi kedua belah pihak.

Ketiga, teologi publik yang melampaui konfrontatif dan negosiatif, yang disebut penulis sebagai pendekatan holistik. Menurut Singgih, perdebatan antara pendekatan

¹⁶ Wijaya, “*Profitability*,” 9.

¹⁷ Wijaya, “*Profitability*,” 1.

¹⁸ Wijaya, “*Profitability*,” ix.

konfrontasi yang memakai analisis struktural Marxian seperti yang dikemukakan Banawiratma dan pendekatan negosiasi yang memakai analisis kultural Weberian seperti yang diperlihatkan Wijaya adalah perbedatan sirkular ibarat ayam dan telur.¹⁹ Pendekatan Weberian melihat motif atau teori di balik tindakan atau praktik aksi.²⁰ Contohnya, tulisan Wijaya tentang kewirausahaan lestari memperlihatkan adanya konsep-konsep tertentu yang menghasilkan kerugian bagi alam seperti gagasan antroposentrik agama Kristen sebagai penyebab kerusakan ekologis. Sedangkan pendekatan Marxian bertolak dari tindakan, kenyataan atau aksi, yang kemudian dibuatkan motif, teori, pandangan atau refleksi tertentu.²¹ Contohnya, bukan konsep tersebut yang perlu dilihat, tetapi tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan ekologis seperti perluasan kebun kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Yang mana yang dahulu? Bagaimana perdebatan antara telur atau ayam, menjadi debat sirkular.

Bagi Singgih, keduanya sama-sama penting, baik struktur maupun budaya. Karena itu tidak perlu dipertentangkan antara negosiatif dan konfrontatif, melainkan mesti melampaui keduanya. Mengapa mesti melampaui keduanya? Karena bagi Singgih, pendekatan Wijaya yang Weberian dan Banawiratma yang Marxian tidak mencukupi kalau dilihat dari perkembangan ilmu-ilmu sosial-budaya kontemporer.²² Dengan kata lain, Singgih nampaknya diinspirasi oleh tulisan-tulisan pemikir kontemporer seperti Pierre Bourdieu dan Norman Fairclough untuk mengembangkan pendekatan yang melampaui keduanya.²³ Dengan memakai pendekatan semacam itu, berteologi publik adalah bernegosiasi dengan pihak penguasa, tetapi negosiasinya bersifat konfrontatif.²⁴

Misalnya dalam isu kewirausahaan lestari, apakah pendekatan konfrontasi diperlukan? Tentu saja perlu, karena industri dan pemerintah cenderung mencari keuntungan, tanpa solider dan melihat keberlanjutan suatu pembangunan. Begitu juga sebaliknya, konfrontasi memang diperlukan, tetapi konfrontasi dengan analisis Marxian saja tidak cukup, tanpa memerhatikan konsep-konsep yang menjadi penyebabnya. Singgih mengambil contoh isu Umbul Wadon dimana perusahaan seringkali curang dari kesepakatan dengan masyarakat. Karena kedudukan masyarakat lemah, maka perusahaan merangkul pemerintah. Kalau ada suasana ketidakadilan di situ, teologi publik harus ke masyarakat, bukan ke perusahaan. Hal inilah yang bagi Singgih

¹⁹ Emanuel Gerrit Singgih, "Membayangkan Keseimbangan di antara 'Profitability, Solidarity, Sustainability': Tanggapan untuk Prof. Yahya Wijaya," Yogyakarta, 13 Januari 2022 (Final Draft), 4.

²⁰ Singgih, "Membayangkan Keseimbangan," 11.

²¹ Singgih, "Membayangkan Keseimbangan," 11.

²² Singgih, "Membayangkan Keseimbangan," 4.

²³ Singgih, "Membayangkan Keseimbangan," 4-5.

²⁴ Singgih, "Membayangkan Keseimbangan," 3.

belum jelas dalam teologi publik Wijaya. Sebab gereja harus berpihak pada masyarakat, baru melakukan negosiasi dengan perusahaan. Kalau tetap tidak bisa, baru lakukan konfrontasi. Jadi negosiasi yang konfrontatif. Namun itu semua dilakukan dengan mempertimbangkan baik pendekatan struktural maupun budaya, bukan berfokus pada salah satunya saja.

Berdasarkan penjelasan itu, terdapat dua ciri teologi publik dengan pendekatan holistik yang melampaui konfrontatif dan negosiatif. Pertama, memiliki nilai keberpihakan yang jelas seperti pendekatan konfrontatif. Namun semangat pemihakannya adalah negosiasi untuk kebaikan bersama. Dengan kata lain, negosiasi dan konfrontasi menjadi berkait-kelindan dalam pendekatan ini dengan berorientasi kepada transformasi kedua belah pihak. Kedua, berupaya tidak terjebak dalam satu kutub, sehingga melampaui analisis struktural Marxian maupun analisis kultural Weberian. Dengan begitu, kedua pendekatan ini sama-sama dipertimbangkan untuk melihat solusi terbaik.

Berdasarkan pemahaman ketiga pendekatan tersebut, penulis berpandangan bahwa teologi publik menempatkan diri bersama berbagai pihak di dalam ruang publik yang berupaya mencari kebenaran atau kebaikan bersama. Teologi publik bersama-sama belajar dari ilmu atau masyarakat dengan kesadaran pentingnya berkolaborasi. Sebab teologi publik menyadari dirinya sebagai satu di antara banyak suara di ruang publik, dan bukan satu-satunya pembawa kebenaran. Namun suara teologi publik memiliki nilai dan pemihakan yang jelas. Karena itu, prinsip kolaborasi secara operasional harus dilakukan secara konfrontasi dengan target negosiasi berbagai suara publik untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, partisipasi teologi publik adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak secara negosiatif sekaligus konfrontatif yang berorientasi untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik. Karena itu, dalam tulisan ini, penulis lebih cenderung mengikuti pendekatan holistik yang melampaui konfrontasi dan negosiasi sebagaimana diusulkan Singgih. Hemat penulis, pendekatan tersebut sejalan dengan teori sosial bioregionalisme dan transaksionalisme yang dicetuskan oleh Richard Evanoff, dan direfleksikan secara teologis oleh Singgih, sebab teori ini juga berupaya melewati antitesa Marxian dan Weberian. Karena itu, pemakaian teori tersebut dalam penelitian tesis ini secara tidak langsung menunjukkan kecenderungan penulis untuk memakai pendekatan holistik Singgih yang melampaui Marxian dan Weberian.

1.2.2. Bioregionalisme Richard Evanoff dalam Kacamata E.G. Singgih

Richard Evanoff adalah seorang professor di Universitas Aoyama Gakuin Tokyo. Evanoff mengembangkan konsep bioregionalisme dan pendekatan transaksional yang bersifat penyelarasan atau harmonisasi berkaitan dengan etika global yang meliputi keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*), keadilan sosial (*social justice*), dan kesejahteraan umat

manusia baik di dalam kebutuhan materialnya maupun dalam perkembangan psikologi, sosial, dan budayanya (*human well-being*).²⁵ Bagi Evanoff, persoalan sosial, ekonomi maupun lingkungan perlu dilihat dengan pendekatan bioregional dalam kerangka keseimbangan antara keprihatinan pribadi, sosial, dan ekologi yang tidak terisolasi, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, pendekatan bioregional berfokus pada keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keberlanjutan ekologis dalam konteks bioregionalisme melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa ekosistem tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa merusak kemampuan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Bioregionalisme mempromosikan prinsip-prinsip seperti reduksi limbah, penggunaan energi baru terbarukan, dan pengembangan sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keadilan sosial dalam bioregionalisme menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Hal ini melibatkan memerangi ketimpangan sosial dan mempromosikan prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, kesetaraan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara kesejahteraan manusia dalam bioregionalisme mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, bioregionalisme mempromosikan pengembangan masyarakat yang lebih mandiri dan terlibat dalam kegiatan lokal, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Dengan demikian, bioregionalisme mengakui bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan alam yang lebih luas, dan bahwa keberlangsungan hidup manusia hanya dapat dicapai dengan mempertahankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial yang seimbang.

Ketiga aspek tersebut dapat diandaikan dalam keseimbangan segitiga yang diadaptasi Evanoff dari konsep "human ecological triangle" Dieter Steiner menjadi keseimbangan antara aspek alam (N: *nature*), masyarakat (S: *society*) dan pribadi (P: *person*).²⁶ Dalam hubungannya dengan teologi, Singgih mengembangkan segitiga Steiner-Evanoff-UKDW menjadi GN (*God-Nature*), GS (*God-Society*) dan GP (*God-Person*). Segitiga itu menggambarkan hubungan di antara pihak Allah, Manusia dan Alam sebagai hubungan yang setara dan saling melengkapi

²⁵ Richard Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics: A Transactional Approach to Achieving Ecological Sustainability, Social Justice, and Human Well-Being* (New York-London: Routledge, 2010), 1.

²⁶ Evanoff, " *Bioregionalism*," 34.

sebagai keseluruhan tanpa mengorbankan sudut-sudutnya sendiri.²⁷ Menurut Singgih, hubungan setara dan saling melengkapi antara Allah, manusia dan alam tersebut mesti dilihat dalam pemahaman mengenai Allah yang imanen sebagaimana ditemukan dalam berbagai teks Alkitab seperti Mazmur 148:3-10, Yesaya 44:23, dan Ayub 36:26-37:13.²⁸ Pemahaman imanensi menunjukkan betapa Allah di dalam alam dan bahwa Allah Israel bukan saja Allah sejarah tetapi juga Allah alam.²⁹ Dengan kata lain, alam tidak berada di bawah manusia melainkan minimal setara dengan manusia. Sebab Allah bisa menyatakan diri di dalam manusia, tetapi bisa juga menyatakan diri di dalam alam. Karena itu, segitiga Steiner-Evanoff-UKDW bisa dipakai untuk menggambarkan hubungan Allah, manusia, dan alam yang setara dan tidak mengorbankan salah satunya. Dengan demikian, salah satu peran agama yang diusulkan Singgih dalam pendekatan bioregionalisme Evanoff adalah membangun teologi kontekstual yang melampaui antroposentrisme dan kosmosentrisme dalam hubungan keseimbangan antara keprihatinan terhadap keberlanjutan ekologis (alam), keadilan sosial (masyarakat) dan kesejahteraan umat manusia (pribadi).

1.3. Rumusan Masalah

Meskipun belum ada penelitian teologis menggunakan pemikiran Evanoff yang langsung berkaitan dengan hilirisasi rumput laut, setidaknya terdapat empat penelitian teologis yang menggunakan pemikiran Evanoff. Pertama, skripsi Sung Sabda Gumelar (2019) yang berjudul “Menuju Keseimbangan Relasi Allah, Alam dan Manusia di dalam Dunia: Kajian Teologi Ekologi dalam angka Keprihatinan Ekologis dengan Pendekatan Bioregional.”³⁰ Merespon kerusakan alam akibat relasi yang tidak seimbang antara Allah, manusia dan alam, Gumelar mendiskusikan teori bioregionalisme Evanoff dengan teologi teisme naturalistik David Ray Griffin. Dengan metode penelitian kajian literasi, Gumelar menawarkan teologi ekologi yang dapat menjaga keseimbangan relasi antara Allah, alam, dan manusia dalam konteks pelayanan GKJW.

²⁷ Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 230–231.

²⁸ Singgih, "Teologi Ekologi," 234.

²⁹ Singgih, "Teologi Ekologi," 234.

³⁰ Sung Sabda Gumelar, "Menuju Keseimbangan Relasi Allah, Alam Dan Manusia Di Dalam Dunia: Kajian Teologi Ekologi Dalam Angka Keprihatinan Ekologis Dengan Pendekatan Bioregional" (Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2019).

Kedua, artikel jurnal Emanuel Gerrit Singgih berjudul “Agama dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan ‘Tesis White’ dalam Konteks Indonesia” (2020).³¹ Dengan mengevaluasi tesis White yang menuduh kerusakan ekologi sebagai akibat dari penerapan pemahaman religius agama Kristen yang antroposentrik, Singgih memperlihatkan evaluasi teologis penelitian tim UKDW berdasarkan teori Evanoff dalam upaya rehabilitasi atau restorasi hutan mangrove di Jawa Timur. Menurut Singgih, tim UKDW memaknai segi tiga Evanoff secara teologi dengan menempatkan Tuhan dalam sudut segitiga sama sisi alam (nature), diri (person), dan masyarakat (society). Jadi, tim UKDW memahami Tuhan tidak hanya sebagai transenden, melainkan juga imanen, dan dalam masalah ekologi, imanensi Tuhanlah yang perlu disadari.

Ketiga, penelitian teologis dalam tesis Fiktor Jekson Banoet (2021) berjudul “Familia Dei: Merayakan Dunia Kehidupan Integral NTT yang Sakramental.”³² Bergumul dengan krisis ekologi yang juga disebutnya sebagai krisis teologi, Banoet menggunakan teori Evanoff dan ekoteologi sakramental John Hart untuk menganalisis hubungan krisis keutuhan lingkungan fisik (ekofer) dan krisis kehidupan manusia (sosiofer) sebagai solusi bagi pembaharuan ekoteologi GMIT di NTT. Dalam konteks NTT, ekokrisis berwajah dwitunggal yaitu krisis atas alam dan kemanusiaan yang saling berhubungan. Karena itu, teori Evanoff memberi jawaban atas usaha teknis membangun dan menyatukan ekonomi (manusia NTT), budaya dan ekologi (fenomena problematis migrasi orang miskin NTT yang hilang harapan terhadap regionnya).

Keempat, penelitian teologis dalam artikel jurnal Pascalini Dwi Aprilia (2022) berjudul “Tinjauan terhadap Food Waste berdasarkan Teori Bioregional Evanoff dan Segitiga Steiner-Evanoff-UKDW.”³³ Aprilia menggunakan teori Evanoff untuk menganalisis perilaku konsumtif berupa *food waste* yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan kerusakan ekologi dan ketimpangan dalam konsumsi makanan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif terhadap data yang diperoleh dari jurnal dan website, Aprilia menemukan bahwa kasus *food waste* dan kelaparan di Indonesia harus diatasi agar terjadi keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia sebagaimana pemikiran bioregionalisme Evanoff.

Keempat penelitian teologis tersebut menggunakan pemikiran bioregionalisme Evanoff sebagai kaca mata analisis untuk menyeimbangkan upaya keberlanjutan ekologis (unsur alam),

³¹ Emanuel Gerrit Singgih, “Agama Dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan ‘Tesis White’ Dalam Konteks Indonesia,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (October 27, 2020): 113.

³² Fiktor Jekson Banoet, “Familia Dei: Merayakan Dunia Kehidupan Integral NTT Yang Sakramental” (Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2021).

³³ Pascalini Dwi Aprilia, “Tinjauan Terhadap Food Waste Berdasarkan Teori Bioregionalisme Richard Evanoff Dan Segitiga Steiner-Evanoff-UKDW,” *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December 29, 2022): 137–149.

keadilan sosial (unsur masyarakat), dan kesejahteraan manusia (unsur diri manusia). Penelitian Gumelar dan Banoet berangkat dari keresahan ekologis untuk menawarkan kerangka pemahaman teologi ekologi bagi gerejanya masing-masing. Sementara penelitian Singgih berangkat dari evaluasi “tesis White” yang direlevansikan dengan keprihatinan ekologis terhadap kelestarian Mangrove, penelitian Aprilia juga berangkat dari keresahan ekologis terhadap kasus *food waste*. Penelitian Gumelar, Banoet, dan Singgih berfokus pada diskursus kajian akademik tentang teologi ekologi dalam rangka menawarkan pembaharuan pemahaman gereja, sedangkan penelitian Aprilia berfokus pada kasus *food waste* di Indonesia yang perlu juga disuarakan oleh gereja. Menariknya, meskipun menggunakan teori Evanoff yang berangkat dari keprihatinan terhadap ketiga aspek yang telah dijelaskan secara seimbang, keempat penelitian teologis ini hanya menitikberatkan pada satu aspek keprihatinan yaitu persoalan ekologis.

Menurut penulis, terdapat dua aspek yang terlewat dalam penelitian teologis menggunakan teori Evanoff tersebut. Pertama, aspek titik berangkat penelitian yang berasal dari keprihatinan holistik dari ketiga aspek tersebut. Kedua, aspek titik tuju penelitian yang berguna bukan hanya bagi gereja tetapi juga masyarakat luas, termasuk pemerintah dan perusahaan. Jadi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan Evanoff, penulis akan memakai pemikiran Evanoff yang ditanggapi oleh Singgih (selanjutnya, Singgih-Evanoff) secara holistik untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi rumput laut di NTT dengan memeriksa kemungkinan-kemungkinan dampaknya di mata para petani rumput laut apabila industrinya dibangun di Kabupaten Alor.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan rumput laut di NTT belum menyoar mengenai hilirisasi industri rumput laut, apalagi mengevaluasi kebijakan pergub terkait pengolahan rumput laut di daerah NTT tersebut. Setidaknya terdapat dua kelompok penelitian rumput laut di NTT. Pertama, diskursus seputar tantangan pengembangan budidaya rumput laut seperti mengevaluasi status keberlanjutan pengembangan budidaya rumput laut dari sisi ketersediaan bibit dan rantai pasar (Turnadjo, et al, 2024), transfer teknologi pengayaan bibit rumput laut (Kusuma et al, 2023), dan pengaruh jarak tanam terhadap tingkat pertumbuhan rumput laut (Kana et al, 2024). Kedua, pelatihan pengolahan sederhana rumput laut menjadi dodol dan mie rumput laut (Tangguda, et al, 2022), es krim rumput laut (Siahaan, et al, 2024), bakso rumput laut (Saraswati et al, 2022), dan masker wajah rumput laut (Andiewati, 2023). Sedangkan khusus rumput laut di Kabupaten Alor, penelitiannya seputar pengembangan budidaya dan rantai pasar, seperti analisis teknis dan faktor pendukung keberhasilan budidaya rumput laut (Tell, 2020), penyuluhan teknik

pengeringan rumput laut (Wabang et al, 2022), pengaruh arus dan substrat terhadap pertumbuhan rumput laut (Plaimo dan Wabang, 2021), pelatihan penggunaan jarak tanam yang ideal untuk menunjang produktivitas rumput laut (Plaimo et al, 2021), penyuluhan penggunaan jaring sebagai pelindung rumput laut (Plaimo, et al, 2022), studi pemetaan potensi dan rantai pasar rumput laut di Kabupaten Alor (Wabang, et al, 2022), dan penelitian WWF terkait daya dukung lingkungan kawasan budidaya rumput laut (Maro, et al, 2023).

Meskipun literasi mengenai hilirisasi industri rumput laut di NTT terbatas, setidaknya kita bisa mendiskusikan kebijakan pergub NTT terkait tata niaga komoditas perikanan dengan teori Evanoff. Seperti penjelasan di awal, peta jalan hilirisasi rumput laut Indonesia memperlihatkan bagaimana keprihatinan untuk mengupayakan pembangunan industri rumput laut dengan aspek keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Kebijakan pemerintah NTT hanya didasarkan pada peningkatan nilai tambah rumput laut sebagai komoditas unggulan perikanan NTT terbesar kedua di Indonesia. Kita belum melihat bagaimana aspek keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial diangkat dalam regulasi tersebut. Namun belum berjalan lama, kebijakan itu ternyata mendapatkan protes keras dari masyarakat terutama para petani. Hal tersebut nampaknya terjadi karena tujuan kesejahteraan para petani yang didambakan kebijakan itu tidak terjadi dalam realisasinya. Kebijakan pergub tersebut ternyata malah membuat para petani rumput laut menderita. Kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, nyatanya malah menyusahakan masyarakat. Hal ini juga tentunya dirasakan oleh para petani di Kabupaten Alor, yang bukan merupakan daerah tempat didirikan pabrik rumput laut tersebut.

Karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana respon petani rumput Alor terhadap kebijakan tersebut, sembari mempersiapkan mereka untuk untuk menyadari dampak-dampak hilirisasi industri rumput laut apabila suatu saat Kabupaten Alor dijadikan salah satu tempat hilirisasi industrinya. Pertanyaannya, sejauh mana analisis teori Bioregionalisme dan Transaksionalisme Singgih-Evanoff cocok dengan kemungkinan dampak hilirisasi rumput laut berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia bagi masyarakat Kabupaten Alor? Dengan begitu, penelitian ini bertujuan membuat sintesis dialogis, memberikan evaluasi kritis dan menyusun rekomendasi sebagai upaya menjawab tantangan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial dalam bingkai teologi publik bagi pemerintah, gereja dan masyarakat sipil untuk mengupayakan kebijakan hilirisasi industri yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat daerah Kabupaten Alor. Dengan menggunakan teologi publik yang memiliki pendekatan holistik, penulis akan mengkaji kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi industri terhadap budidaya rumput laut

di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan analisis teori bioregionalisme Singgih-Evanoff.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal itu, pertanyaan utama penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: Sejauh mana analisis teori Bioregionalisme Richard Evanoff yang direfleksikan Emanuel Gerrit Singgih cocok dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi budidaya rumput laut bagi para petani rumput laut di Kabupaten Alor?

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam tulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.³⁴

Dalam rangka itu, penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif yang diharapkan mengangkat ke atas permukaan motivasi masyarakat terkhususnya para petani rumput laut di tiga lokasi penelitian. Minat utama penulis adalah menemukan motivasi yang menggerakkan para petani rumput laut di samping kemungkinan adanya motivasi-motivasi lain seperti yang berasal dari “local wisdom” atau pun prospek pasar. Pertanyaan-pertanyaan penelitian penulis adalah apa yang menjadi motivasi dalam mengelola budidaya rumput laut? Mengapa dan bagaimana para petani membangun dan memelihara atau melestarikan motivasi ini?

Penelitian kualitatif yang digunakan adalah metodologi teologi publik yang diadaptasi dari Neil Darragh.³⁵ Langkah-langkahnya terdiri atas menyadari masalah etis dalam diskursus publik, mempelajari analisis teori-teori sosial terhadap masalah tersebut, memahaminya dalam

³⁴ John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 4–5.

³⁵ Neil Darragh, “Doing Theology in Public: An Engagement with Economic Rationalism,” *International Journal of Public Theology* 4 (2010) 391–409.

analisis bahasa teologis, membuat sebuah proposisi kritik Kristen (*mereview* bagaimana sumber kekristenan menghadapi dan menyelesaikan problem tersebut), dan menerjemahkan kembali kritik Kristen ke dalam bahasa diskursus publik. Cara kerja metode ini dapat ditandai dalam persoalan etis kebijakan hilirisasi rumput laut di Alor yang dijelaskan pada Bab 2, dalam interpretasi menggunakan teori Singgih-Evanoff yang dijelaskan pada Bab 3, dan rencana aksi atau situasi ideal berupa sumbangan pemikiran penulis bagi keberlanjutan budidaya rumput laut di Alor sekaligus mempersiapkan para petani menghadapi dampak-dampak kebijakan hilirisasi industri rumput laut ke depan, yang dijelaskan pada Bab 4. Oleh karena pendekatan holistik menjadi ciri khas teori bioregionalisme Singgih-Evanoff, maka metodologi Darragh yang akan digunakan penulis juga menunjukkan bagaimana teologi publik dengan pendekatan yang melampaui konfrontasi dan negosiasi dapat dilihat dalam upaya penulis menjawab pertanyaan penelitian di atas.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II MASALAH HILIRISASI RUMPUT LAUT ALOR, NTT DAN TEORI BIOREGIONALISME DAN TRANSAKSIONALISME SINGGIH-EVANOFF

Bab ini akan mengulas isu mengenai hilirisasi industri secara umum beserta permasalahan etis seputarnya dan diskursus mengenai kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi industri terhadap budidaya rumput laut khususnya di Kabupaten Alor, NTT

BAB III ANALISIS MASALAH HILIRISASI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN ALOR, PROVINSI NTT MENGGUNAKAN PEMIKIRAN SINGGIH-EVANOFF

Bab ini akan membahas analisis hasil penelitian terkait kesadaran masyarakat petani rumput laut mengenai kemungkinan dampak hilirisasi budidaya rumput laut ditinjau dengan teori bioregionalisme dan transaksionalisme Singgih-

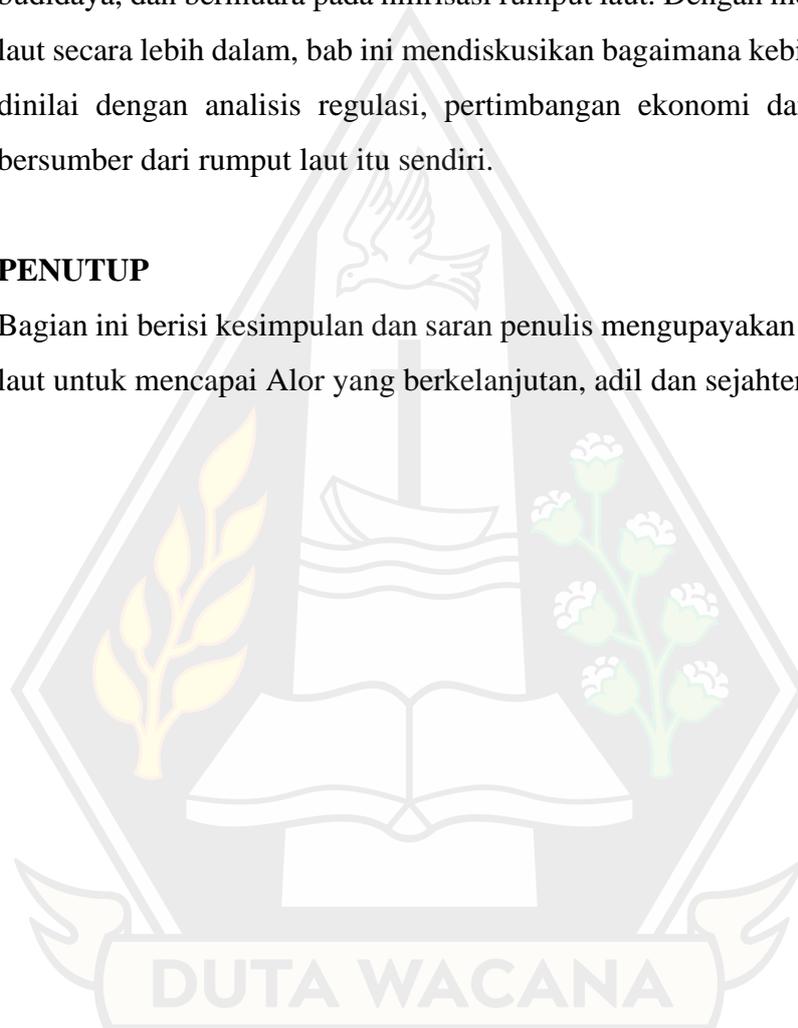
Evanoff. Bab ini juga menyertakan refleksi personal penulis setelah melakukan penelitian rumput laut di Kabupaten Alor, NTT

BAB IV DARI ALAM LIAR, BUDIDAYA MENUJU HILIRISASI RUMPUT LAUT: BAGAIMANA SITUASI IDEALNYA?

Bab ini akan membahas bagaimana perkembangan pemanfaatan rumput laut mulai dari panen rumput laut yang tumbuh liar di alam, bergerak dalam budidaya, dan bermuara pada hilirisasi rumput laut. Dengan memahami rumput laut secara lebih dalam, bab ini mendiskusikan bagaimana kebijakan Pergub itu dinilai dengan analisis regulasi, pertimbangan ekonomi dan ekologi, yang bersumber dari rumput laut itu sendiri.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran penulis mengupayakan hilirisasi rumput laut untuk mencapai Alor yang berkelanjutan, adil dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bagian pendahuluan penulis telah mengajukan satu pertanyaan utama dalam penelitian. Karena itu, pada kesimpulan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan tesis dengan menjawab secara eksplisit pertanyaan tersebut. Pertanyaan utama penelitian penulis adalah “sejauh mana analisis teori bioregionalisme Richard Evanoff yang direfleksikan Emanuel Gerrit Singgih cocok dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi rumput laut bagi para petani rumput laut di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur?” Namun sebelum menjawabnya, penulis akan memaparkan bagaimana penulisan tesis ini dibangun. Pertama, tesis ini berangkat dari dua keprihatinan awal penulis. Di satu sisi, penulis prihatin teologi dapat berdialog dengan sumber yang relevan untuk menghadapi isu hilirisasi yang dipandang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, namun realisasinya malah menyulitkan masyarakat, merugikan alam dan menunjukkan tingginya jurang ketimpangan. Di sisi lain, keprihatinan tersebut juga berangkat dari mimpi untuk melihat kampung halaman, daerah Kabupaten Alor, menjadi daerah yang lebih berkelanjutan ekologisnya, lebih adil masyarakatnya, dan lebih sejahtera manusia di dalamnya. Berangkat dari dua keprihatinan tersebut, kedua, tesis ini mengangkat isu kebijakan hilirisasi industri rumput laut sebagai agenda prioritas nasional yang secara tidak langsung coba diupayakan juga oleh pemerintah provinsi NTT. Meskipun dalil utama hilirisasi industri rumput laut adalah untuk peningkatan ekonomi nasional, aspek-aspek mengenai pertimbangan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia juga dapat dilihat dalam *road map* yang dibuat pemerintah pusat. Tetapi dalam konteks Provinsi NTT yang merupakan produsen rumput laut kedua terbesar di Indonesia, agenda nasional itu dilakukan secara tertutup hanya untuk kepentingan provinsi NTT, dan berdampak merugikan ekonomi para petani lokal, membahayakan keberlanjutan ekologis, dan menunjukkan tingginya ketimpangan sosial. Karena itu, salah satu isu etis-teologis yang muncul adalah kebijakan tersebut menghambat relasionalitas antara aspek keberlanjutan ekologis (alam), keadilan sosial (sosial), dan kesejahteraan manusia (person).

Setelah memperlihatkan bagaimana isu etis-teologis dari dampak kebijakan hilirisasi industri rumput laut di NTT, ketiga, tesis ini memperlihatkan bagaimana teori sosial bioregionalisme-transaksionalisme Evanoff yang direfleksikan secara teologis oleh Singgih menjadi teori yang memadai untuk menganalisis isu tersebut karena berbicara lebih banyak tentang pentingnya relasionalitas antara alam (keberlanjutan ekologis), masyarakat (keadilan

sosial), manusia (kesejahteraan manusia), dan Tuhan. Dengan memakai teori Singgih-Evanoff itu, penulis meneliti sejauh mana kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi rumput laut direfleksikan oleh para petani di Kabupaten Alor, NTT. Tujuannya bukan hanya untuk meneliti agenda hilirisasi pemerintah Provinsi NTT, tetapi juga berdialog dan mempersiapkan para petani untuk menghadapi arus deras hilirisasi di masa depan. Keempat, tesis ini berlanjut pada memperlihatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman para petani tentang hilirisasi rumput laut masih sangatlah minim. Jangankan membayangkan hilirisasi, membudidaya rumput laut saja belum dilakukan dengan maksimal, karena hanya memanfaatkan metode patok dasar. Tetapi potensi rumput laut di Kabupaten Alor sangatlah besar yang mestinya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah Alor yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Meskipun memperlihatkan beberapa aspek seperti keberlanjutan ekologis, kerukunan umat beragama dan “local wisdom” yang dapat dikaitkan dengan pandangan terhadap Tuhan, penelitian tesis ini berkesimpulan kebijakan hilirisasi rumput laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT tidak cocok dengan teori bioregionalisme Singgih-Evanoff.

Kelima, tesis ini kemudian bergerak untuk merefleksikan perjalanan penulis bersama para petani rumput laut di Alor. Dengan mengangkat tafsir sosio-ekologis terhadap Lukas 5:1-11, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan bukan hanya bisa ditemukan dalam pekerjaan rumput laut, tetapi Tuhan juga bisa ditemukan di dalam rumput laut itu sendiri. Dengan begitu, pekerjaan rumput laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kepada Tuhan, sehingga suka tidak suka, kebijakan hilirisasi rumput laut juga harus mempertimbangkan relasi antara kepentingan rumput laut, petani, pengumpul, dan pemerintah. Keenam, tesis ini juga berangkat lebih jauh untuk mendalami apa itu rumput laut, bagaimana konsep hilirisasi dan mendiskusikannya dengan kebijakan hilirisasi dalam Pergub NTT No. 39 Tahun 2022 yang dinilai memiliki isu monopsoni dan proteksionisme. Rumput laut yang semula hidup dalam alam liar dan sangat berguna bagi keberlanjutan lingkungan, meskipun dimanfaatkan manusia untuk kepentingan ekonomi, dapat tetap menjadi penjaga ekologi bukan saja pada saat budidaya, tetapi juga dalam hilirisasi industri. Pemahaman ini sangatlah penting agar rumput laut yang sudah mengalami hilirisasi dengan diversifikasi produk yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi nasional dapat tetap menjaga keberlanjutan ekologis sambil meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan temuan ini, kebijakan hilirisasi rumput laut provinsi NTT yang dialami para petani Kabupaten Alor dipandang bukan saja tidak cocok dengan teori bioregionalisme Singgih-Evanoff, tetapi juga tidak cocok dengan bagaimana memahami rumput laut dan konsep hilirisasi itu sendiri. Karena

itu, kebijakan pemerintah provinsi NTT tersebut harus dihapuskan dan tidak boleh diambil lagi dikemudian hari. Meski demikian, industri hilirisasi rumput laut tetap dapat dibangun di NTT terutama daerah Kabupaten Alor, sejauh berada dalam ranah kewenangan nasional, sehingga mampu menjaga perdagangan antar regional yang telah dibangun, sambil memitigasi dampaknya yang buruk dengan menjaga keseimbangan relasi antara keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan para petani rumput laut.

Berdasarkan uraian panjang dalam tesis ini, penulis ingin menjawab pertanyaan utama tesis ini secara gamblang bahwa kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi rumput laut di Alor, NTT tidak cocok sama sekali dengan teori bioregionalisme Singgih-Evanoff. Oleh karena itu, untuk mencapai Alor yang berkelanjutan, adil dan sejahtera, penulis menyarankan pertamanya kita perlu mendorong penghapusan kebijakan semacam itu dan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di masa depan, sehingga kewenangan kebijakan hilirisasi dikembalikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, perjuangan untuk mencapai Alor yang demikian dapat diupayakan lebih lanjut dengan memantapkan model budidaya rumput laut yang benar-benar efektif bagi Kabupaten Alor sehingga para petani dapat menghasilkan produk rumput laut yang berkualitas. Apabila itu tercapai, maka terakhir, kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Alor, pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Pusat, serta berbagai stakeholder lainnya seperti LSM WALHI NTT dan para pemuka agama dan tokoh adat, untuk dapat sama-sama mendorong hilirisasi industri rumput laut di Kabupaten Alor. Namun upaya itu pada akhirnya hanya boleh dijalankan, sejauh semua pihak yang terlibat sama-sama mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut yang menjaga keseimbangan aspek keberlanjutan ekologis rumput laut dan ekosistem sekitarnya, aspek keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Alor untuk dapat turut merasakan dampak positifnya, dan aspek kesejahteraan para petani rumput laut. Dengan demikian, hasil penelitian tesis ini menegaskan pendekatan teologi publik holistik sebagaimana dikemukakan Singgih, yaitu memiliki nilai pemihakan yang jelas terhadap petani rumput laut dan masyarakat Kabupaten Alor dan menempuh jalan konfrontasi sikap yang cukup keras seperti terlihat pada kesimpulan, dengan harapan sekaligus menempuh jalan negosiasi dan rekonsiliasi dengan berbagai pihak dalam ruang publik, terutama pemerintah Kabupaten Alor dan Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. “Kebijakan Integratif Dalam Transformasi Industri Kecil Menengah Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Strategis.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (November 2024): 235-244.
- Akhmadi, Fauzan. “Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (April 2024): 25-31, <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>.
- Aprilia, Pascalin Dwi. “Tinjauan Terhadap Food Waste Berdasarkan Teori Bioregionalisme Richard Evanoff Dan Segitiga Steiner-Evanoff-UKDW.” *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December 29, 2022): 137–149.
- Banawiratma, J.B. *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- _____. “Pertimbangan Mengenai Teologi Publik Yang Berorientasi Pembebasan Holistik. Makalah Webinar EATWOT Indonesia, 18 Desember 2021.
- Banoet, Fiktor Jekson. “Familia Dei: Merayakan Dunia Kehidupan Integral NTT Yang Sakramental.” Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2021.
- Buchholz, Cornelia M., Gesche Krause, dan Bela H. Buck. “Seaweed and Man.” In *Seaweed Biology*, edited by Christian Wiencke dan Kai Bischof. London: Springer, 2012.
- Bueno, Mónica, et al. “Downstream Green Processes for Recovery of Bioactives from Algae.” In *Grand Challenges in Algae Biotechnology*, edited by Armin Hallmann dan Pabulo H. Rampelotto. London: Springer, 2020.
- CNBC Indonesia. “Presiden Jokowi: Ada 3 Fokus Utama Transformasi Ekonomi RI.” News. *CNBC Indonesia*, Agustus 2021. Accessed June 26, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210826060555-8-271305/presiden-jokowi-ada-3-fokus-utama-transformasi-ekonomi-ri>.
- Ermatinger, James W. *Daily Life in The New Testament*. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2008.
- Evanoff, Richard. *Bioregionalism and Global Ethics: A Transactional Approach to Achieving Ecological Sustainability, Social Justice, and Human Well-Being*. New York-London: Routledge, 2010.
- Fakhraini, M.S., et al. “Carbon Sequestration in Macroalgae *Kappaphycus Striatum* in

- Seaweed Aquaculture Site, Alaang Village, Alor Island, East Nusa Tenggara.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 404 (2020): 1-8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/404/1/012044>.
- Forest Insights. “Jokowi Tekankan Pentingnya Ekonomi Hijau, Sebut Soal Rehabilitasi Hutan Dan Mangrove.” *Forest Insights*, Agustus 2022. Accessed June 22, 2023. <https://forestinsights.id/jokowi-tekankan-pentingnya-ekonomi-hijau-sebut-soal-rehabilitasi-hutan-dan-mangrove/>.
- Gaebelein, Frank E., ed. *The Expositor's Bible Commentary, Vol. 8, Matthew, Mark, Luke*. Michigan: Zondervan Publishing House, 1984.
- Green, Joel B. *The Gospel of Luke*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997.
- Gumelar, Sung Sabda. “Menuju Keseimbangan Relasi Allah, Alam Dan Manusia Di Dalam Dunia: Kajian Teologi Ekologi Dalam Angka Keprihatinan Ekologis Dengan Pendekatan Bioregional.” Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2019.
- Hasibuan, Sawarni. “Pemetaan dan Strategi Pemanfaatan Teknologi pada Industri Olahan Rumput Laut Indonesia yang Berkelanjutan.” *Jurnal OE* 7, no. 1 (Maret 2015).
- Jayani, Dwi Hadya. “Potret Data Ekonomi Indonesia Setahun Pemerintahan Jokowi.” *News. Katadata*, Oktober 2020. Accessed June 15, 2023. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f9265445d458/potret-data-ekonomi-indonesia-setahun-pemerintahan-jokowi>.
- Kana, Arifin G.D., Yuliana Salosso, dan Welem Turupadang. "Pengaruh Jarak Tanam yang Berbeda dari Garis Pantai di Perairan Desa Oenaek, Kabupaten Kupang, NTT terhadap Tingkat Pertumbuhan dan Kandungan Karaginan pada Rumput Laut (*Kappaphycus alvarezii*)." *Jurnal Aquatik* 7, no. 2 (Oktober 2024): 59-68. <https://doi.org/10.35508/jaqu.v7i2.18695>.
- Kementerian ESDM. “Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau Di Indonesia.” *Kementerian ESDM*, September 20, 2021. Accessed June 25, 2023. <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>.
- Kusuma, Ni Putu Dian, et al. "Transfer Teknologi Pengayaan Bibit Rumput Laut Yang Dibudidayakan Dengan Keramba Jaring Apung." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana* 1, no. 4 (Oktober 2023): 97–107, <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v1i4.121>.
- Ngebos, Filemon Fridolino, et al. “Regulasi Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Nusa

- Tenggara Timur Dalam Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Proyuris* 6, no. 1 (April 2024): 86-100.
- O’Connor, Kaori. *Seaweed: A Global History*. London: Reaktion Books Ltd, 2017.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Radulovich, Ricardo, et al. “Farming of Seaweeds.” In *Seaweed Sustainability: Food and Non-Food Applications*, edited by Brijesh K. Tiwari dan Declan J. Troy. London: Academic Press, 2015.
- Rahmadani, Thoy Batun Citra, dan Nuri Muahiddah. “Potensi Budidaya Laut dengan Menggunakan Konsep Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).” *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan* 10, no. 3 (September 2024): 464-474, <https://doi.org/10.29303/jstl.v10i3.664>.
- Serihollo, Lukas Giovani Gonzales, et al. "Kontaminasi Mikroplastik pada Rumput Laut dari Beberapa Lokasi Budidaya di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 24, no. 1 (Februari 2025): 37-45. <https://doi.org/10.14710/jkli.24.1.37-45>.
- Setiaji, Hidayat. “Periode Kedua Jokowi, Ayo Lupakan Pertumbuhan Ekonomi 7%!” News. *CNBC Indonesia*, July 25, 2019. Accessed June 25, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190725094011-4-87432/periode-kedua-jokowi-ayo-lupakan-pertumbuhan-ekonomi-7/2>.
- Siahaan, Irandha Citra Marasi, et al. "Pelatihan Diversifikasi Olahan Rumput Laut Pada Wanita Pesisir di Desa Tesabela - Kabupaten Kupang Barat, NTT." *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment* 4, no. 3 (Oktober 2024): 355–360. <https://doi.org/10.29303/jppi.v4i3.3646>
- Singgih, Emanuel Gerrit. “Agama Dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan ‘Tesis White’ Dalam Konteks Indonesia.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (October 27, 2020): 113-136, <https://doi.org/10.21460/gema.2020.52.614>.
- _____. "Membayangkan Keseimbangan di antara 'Profitability, Solidarity, Sustainability': Tanggapan untuk Prof. Yahya Wijaya." Yogyakarta, 13 Januari 22 (Final Draft)
- _____. *Pengantar Teologi Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Tangguda, Sartika, et al. "Seaweed Processing *Eucheuma Sp.* for The Community Group of

- Tablolong Village, West Kupang, NTT." *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment* 2, no. 2 (Juni 2022): 87–92, <https://doi.org/10.29303/jppi.v2i2.1337>.
- Tunardjo, M. P., et al. "Status Keberlanjutan Pengembangan Rumput Laut di Provinsi NTT." *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian* 7, no. 1 (Desember 2024): 478–498. Retrieved from <https://ejurnal.politanikoe.ac.id/index.php/psnp/article/view/430>.
- Wabang, Imanuel Lamma, et al. "Mapping Study on Market Potential and Market Chain for Seaweed in Alor Regency, East Nusa Tenggara Province." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2022): 1-15, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1038/1/012014>.
- White, William Lindsey, dan Peter Wilson. "World Seaweed Utilization." In *Seaweed Sustainability: Food and Non-Food Applications*, edited by Brijesh K. Tiwari dan Declan J. Troy. London: Academic Press, 2015.
- Wijaya, Yahya. *Profitability, Solidarity, Sustainability: Tinjauan Teologi Publik Tentang Kewirausahaan Lestari*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2021.
- Yun, Jin-Ho, et al. "Valorization of waste materials from seaweed industry: An industry survey based biorefinery approach." *Reviews in Aquaculture* 15 (2023): 1020-1027, <https://doi.org/10.1111/raq.12748>.

